

PERS DAN PEMBANGUNAN DESA*

Jacob OETAMA

Persoalan ini akan didekati dari berbagai segi: 1. mana yang lebih baik untuk pembangunan desa, komunikasi lewat medium pers atau lewat media massa lain seperti radio, televisi, film, kaset; 2. fungsi-fungsi apa yang bisa dikembangkan oleh pers untuk menunjang pembangunan desa; 3. beberapa typologi pers yang mungkin, dilihat dari pembangunan desa.

1. PERS DI ANTARA MEDIA MASSA LAINNYA

Perkembangan media massa di Eropa dan Amerika Serikat mengikuti garis sekuensi dan linier. Pertama-tama surat kabar dan media cetak lainnya, baru radio, film televisi. Jarak penemuan media yang satu dengan yang lain berjarak cukup panjang. Sekalipun jarak itu semakin mutakhir, semakin pendek. Inovasi media cetak memerlukan beberapa abad, inovasi televisi hanya satu dasa warsa.

Negara non-industri atau negara sedang berkembang dihadapkan pada perkembangan yang simultan, semua media massa serentak tersedia dalam waktu yang relatif bersamaan. Sekaligus orang bisa menggunakan media cetak dan media elektronis. Surat kabar, radio, film, televisi, kaset sekaligus tersedia. Maka bisa dilakukan pilihan, mana yang dipandang lebih efisien dan efektif untuk berbagai tujuan dan khalayak (audience), mengingat kelebihan dan keterbatasan masing-masing medium. Kombinasi-kombinasi mana bisa dilakukan.

Pola kebudayaan khalayak yang menjadi sasaran komunikasi merupakan kriteria pokok dalam menentukan kemungkinan dan pilihan, di samping tingkat perkembangan sosial ekonomi.

* Kertas kerja pada *Seminar Nasional Kebijakan Komunikasi Nasional*, Jakarta 26-29 Juli 1978

Pola kebudayaan dalam masyarakat desa di negeri kita bukanlah membaca tetapi melihat dan mendengarkan, nonton. Jumlah yang melek huruf terbatas, diperkirakan masih sekitar 40 persen yang buta huruf di seluruh negeri. Jumlah yang mempunyai kebiasaan membaca lebih sedikit lagi.

Maka dilihat dari pola kebudayaan itu, barangkali radio, film, televisi, bahkan juga kaset, bisa lebih efektif sebagai pembawa pesan dari pada surat kabar dan majalah.

Televisi memiliki kemungkinan yang terbesar. Daya ekspresinya besar, gambar hidup, bersuara, ditonton ramai-ramai, disaksikan secara kolektif tidak seperti surat kabar yang dibaca sendirian. Itulah sebabnya, Mc Luhan sosiologi Kanada itu berpendapat, televisi mengembalikan kehidupan berpola desa.

Apakah lantas tidak tersedia tempat untuk pers? Surat kabar mempunyai beberapa kelebihan. Untuk bisa berkomunikasi lewat pers, diperlukan kemampuan membaca. Kemampuan membaca dan kemudian dikembangkan menjadi kebiasaan dan kebutuhan membaca, merupakan pembuka jalan akan perkembangan kebudayaan yang lebih meningkat, dalam dan luas.

Pembangunan desa adalah pembangunan masyarakat desa. Sekalipun kini prioritasnya masih pada bidang sosial ekonomi, tetapi tercakup dalam proses pembangunan itu adalah pembangunan kecerdasan, pengetahuan, kebudayaan. Pendidikan adalah sarananya.

Televisi sedang mengalami fase inovasi baru. Dalam beberapa tahun lagi, khalayak akan bisa "talk back" kepada televisinya. Persoalan umpan balik akan dipecahkan. Namun bagaimanapun juga, kiranya kebudayaan membaca mempunyai kelebihan-kelebihan dimensi yang tidak akan bisa ditandingi oleh gambar, betapapun ekspresifnya konfigurasi gambar hidup itu.

Pers berasumsi adanya kemampuan membaca. Kemudian melalui proses interaksi, pers ikut mengembangkan kemampuan membaca masyarakat menjadi kebudayaan membaca.

Lagipula masyarakat lokal, regional, nasional dan mondial, berkembang semakin kompleks. Ada keperluan yang semakin besar pula untuk mengetahui kekompleksan tersebut. Lebih dari media yang lain, pers tampaknya akan tetap mempunyai kelebihan dalam memberikan makna dan arah dalam dunia yang semakin kompleks.

Bisa disimpulkan, tanpa mengabaikan prioritas berbagai media, terutama televisi untuk pembangunan masyarakat desa, pers tetap mempunyai tempat dan sewajarnya ikut dikembangkan dalam fungsi serta kehadirannya dalam pembangunan desa.

2. PERS DAN PEMBANGUNAN DESA

Masalah ini ditinjau dari dua sudut: yang pertama kehadiran pembangunan masyarakat desa dalam pers dan yang kedua presensi pers dalam masyarakat desa. Tinjauan yang kedua dimasukkan ke dalam bab berikutnya, yaitu berbagai tipologi pers.

Dalam bab ini, dikaji kehadiran pembangunan desa dalam pers. Ini perkembangan baru. Pers berkomunikasi dengan masyarakat. Titik temu komunikasi itu adalah isi pers, pesan dalam pers. Melalui isi surat kabar itu, dibangun hubungan yang konstan antara pers sebagai lembaga dan masyarakat pembaca.

Supaya komunikasi bisa terjadi dan berkembang fungsional, maka harus terjadi "korespondensi" antara pers dan masyarakat pembaca. Ini terlaksana, apabila isi surat kabar menyangkut apa yang menjadi kepentingan dan dirasakan sebagai kepentingan oleh masyarakat pembacanya.

Memang harus dipersoalkan, dalam korespondensi itu siapa

yang lebih berperan menentukan. Maka dari masalah ini berkembang beberapa pengamatan yang dirumuskan dalam ungkapan seperti pers itu refleksi masyarakat, pers itu memang refleksi masyarakat, tetapi refleksi yang aktif, pers itu refleksi yang ditentukan oleh masyarakat atau pers itu bukan sekedar refleksi aktif, tetapi menentukan arah dan selera masyarakat. Maka pers bisa berfungsi sebagai pemberi arah.

Bagaimana pola hubungan yang aktual terjadi, mana yang dominan pers atau masyarakat, tergantung dari berbagai faktor. Di antaranya yang pokok adalah sistem sosial politik dan sosial ekonomi, di mana pers dan masyarakat itu berada dan berfungsi.

Tetapi secara umum bisa dikatakan, pers lebih berperan aktif, lebih memberikan arah dari pada masyarakat pembaca. Namun peranan aktif dan arah yang diberikan oleh pers, selalu harus berada dalam korespondensi dengan masyarakat. Artinya, isi dan pesannya sedemikian rupa, sehingga masyarakat mengerti dan merasa, kepentingan, persoalan, keperluan, cita rasa, dan perasaannya dibawakan oleh pers.

Karena pembaca surat kabar sebagian terbesar adalah masyarakat kota, maka persoalan, minat, kepentingan dan selera masyarakat kota juga yang menjadi substansi isi dan cita rasa pers. Kita bisa mengujinya dengan meneliti isi surat kabar secara kuantitatif dan kualitatif. Sampai-sampai ada pendapat, pers itu fenomena kota.

Desa masuk pers, pembangunan masyarakat desa masuk pers adalah perkembangan dan orientasi baru. Argumen-argumen obyektif begitu kuat, sehingga orientasi desa masuk pers merupakan gejala yang semakin tampak dalam pers Indonesia.

Argumen itu misalnya, komitmen akan pembangunan nasional. Persepsi bahwa pembangunan nasional harus diartikan usaha memperbaiki kesejahteraan hidup sebagian besar rakyat yang tinggal di pedesaan meluas secara intensif.

Tumbuh pengertian bahwa kota dan desa harus berkembang dalam suatu kesatuan yang organis. Kepentingan masyarakat desa mempengaruhi kepentingan masyarakat kota. Masalah pembangunan desa adalah masalah yang menyentuh dan karena itu secara subyektif juga harus dibuat menyentuh kepentingan masyarakat kota.

Dengan kata lain, pembaca surat kabar yang sebagian besar masih terpusat di kota-kota harus ditumbuhkan pengertian, sikap dan cita rasanya, sehingga mau membaca masalah pembangunan desa, yang juga menjadi isi surat kabar yang terbit di kota.

Inilah tugas baru untuk pers. Beberapa implikasi tampil dari orientasi ini. Pembaruan persepsi tentang yang diartikan sebagai berita. Kemampuan mengumpulkan, melaporkan dan menyajikan masalah pembangunan desa dalam bentuk dan gaya yang memenuhi persyaratan berita atau tulisan pers, sehingga dengan demikian, masyarakat tertarik untuk membacanya dan bisa paham pula.

Unsur-unsur berita seperti aktual, dinamis, mengandung aspek baru, memberikan makna dan keterlibatan, daya tarik yang muncul dari perbandingan, konflik, sensasi, harus tetap konstan ada. Materinya yang berubah, berkembang lebih luas, mencakup permasalahan kota dan desa.

Wabah kolera yang minta korban 100 jiwa adalah berita. Wabah wereng yang merusak panen, sehingga 2000 penduduk desa kehilangan penghasilan, harus mampu juga dilaporkan sedemikian rupa, sehingga diterima sebagai berita yang bermakna juga oleh pembaca di kota.

Yang baru kita persoalkan adalah pembaruan persepsi tentang berita, perluasan materi berita dan kemampuan untuk menuangkannya dalam bentuk yang sanggup memikat daya tarik dan pemahaman.

Persoalan berikutnya ialah pengetahuan dan persepsi pers tentang pembangunan desa itu sendiri. Pengetahuan itu tidak usah sekaligus seperti yang dimiliki oleh seorang agronom. Tetapi pokok-pokok persoalan, berbagai pendekatan, perlu dipahami.

Pengertian orang tentang pembangunan desa mengalami perubahan. Semula pengertian itu berpusat pada dua pendekatan: pertama, bahwa pembangunan yang terjadi di kota-kota, pembangunan di bidang industri akan menetes ke bawah ke desa. Pendekatan kedua ialah bahwa di desa pun, yang harus dipusatkan adalah kenaikan produksi, kenaikan hasil tanah.

Kedua pendekatan itu kini direvisi: penetesan ke bawah dari pembangunan industri tidak terjadi. Atau jika terjadi sedemikian kecil, sehingga tidak mampu menaikkan penghasilan penduduk desa, maka tidak mampu juga meluaskan pasar untuk hasil industri. Belum lagi aspek kemanusiaan dan keadilan sosialnya.

Pendekatan produksi saja untuk pembangunan desa, ternyata juga tidak memadai. Di Indonesia, khususnya di Jawa, yang kini selalu dilukiskan oleh para agronom ialah gambaran berikut: penduduk bertambah banyak di desa, pemilikan tanah semakin sempit.

Dr. Sayogya mengutip hasil sensus pertanian 1973 dibandingkan dengan sensus tahun 1905. Menurut sensus itu petani pemilik tanah dibagi menjadi 3 golongan: 1. golongan terbawah, petani dengan milik tanah sampai 0,25 ha; 2. golongan menengah, petani bertanah sampai 0,7 persen dan golongan teratas petani dengan tanah sampai 1,8 ha.

Jika pada tahun 1905 golongan kedua dan ketiga masih merupakan 63 persen, maka pada tahun 1973, golongan 2 dan 3 turun menjadi 41 persen, sebaliknya golongan pertama, naik dari 31 persen menjadi 59 persen. Petani gurem semakin besar.

Sedangkan "petani" yang tidak mempunyai tanah sama sekali diperkirakan sekitar 30 persen oleh Dr. Sayogya. Sebagai gambaran lebih lanjut, dikutipnya hasil survey Agro-Ekonomi Bogor di 6 desa Daerah Aliran Sungai, Das, Cimanuk, Jawa Barat. Golongan bawah, petani dengan tanah kurang dari 0,25 persen berjumlah 49 persen, golongan tengah yang bertanah antara 0,25 ha sampai 0,5 ha 23 persen dan yang golongan atas, bertanah lebih dari 0,5 ha, 28 persen (lihat Dr. Sayogya dalam Prisma April 1978 dengan judul "Lapisan Masyarakat Yang Paling Lemah di Pedesaan Jawa).

Menurut penelitian-penelitian itu, yang terutama diuntungkan oleh proyek intensifikasi adalah golongan kedua dan ketiga, sedangkan golongan pertama, yaitu petani gurem dan buruh tani, hampir-hampir tidak kebagian. Sedangkan jumlah mereka cukup besar, diperkirakan 30 persen dari seluruh penduduk desa di Jawa.

Itu baru satu segi dari masalah pembangunan desa. Masih banyak masalah pokok yang lain. Ambillah misalnya soal Koperasi yang pembangunannya melalui proses antara, Badan Usaha Unit Desa dan Koperasi Unit Desa.

Masalah pokok dari Koperasi ialah, bahwa menurut jenisnya, usaha Koperasi harus tumbuh dari bawah dan memerlukan proses waktu. Usaha itu harus dipercepat, maka dikembangkan dari atas. Bagaimana mempertemukan intervensi dari atas dan tanggapan dari bawah itu sedemikian rupa, sehingga Koperasi benar-benar berkembang atas kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat, bukan sekedar menjadi jawatan yang bernama Koperasi.

Gagasan lain muncul: apakah benar, pembangunan desa diartikan sebagai mengintroduksi prasarana kota ke desa? Ataukah pembangunan desa harus pertama-tama diartikan sebagai mendinamiskan potensi dalam masyarakat desa itu sendiri dan membuat efisien segala potensi yang ada di sana berikut prasarana-prasarananya?

ANALISA

Bukankah maksud kertas kerja ini untuk berdiskusi panjang lebar tentang pembangunan desa. Namun pokok-pokok persoalan sebagai bahan dan sumber berita serta penulisan, memang perlu dikenali oleh pers.

Salah satu pokok masalah itu misalnya, bagaimana memperbaiki nasib petani gurem dan buruh tani, yang menurut perkiraan di Jawa ini merupakan sekitar 30 prosen dari penduduk pedesaan. Bagaimana menciptakan lapangan kerja di samping bertani. Lapangan kerja apa paling cocok, dilihat dari berbagai segi kemungkinannya.

Dimuatnya masalah pembangunan desa dalam pers mempunyai beberapa sasaran: 1) agar masyarakat pembaca dari kota mempunyai pengetahuan, gambaran dan keterlibatan, karena desa dan kota adalah kesatuan, karena itulah komponen-komponen organis dari masyarakat bangsa Indonesia yang satu; 2) agar pemerintah dan segala aparaturnya yang berkepentingan memperoleh bahan untuk melengkapi data dan laporan dari aparaturnya; 3) untuk para pembaca di kalangan petani sendiri.

Sasaran pertama dan kedua mendukung gagasan desa masuk pers, sasaran ketiga menunjang usaha mengembangkan pers masuk desa. Tipologi pers yang akan dibicarakan kemudian, ada hubungannya dengan ketiga sasaran tersebut.

Setelah mempunyai pengetahuan komprehensif tentang pembangunan desa dan segala permasalahannya, langkah berikutnya ialah mempersoalkan bagaimana menjadikan pembangunan desa menjadi bahan pers yang bermanfaat, menarik, dibaca orang.

Dalam usaha mencari dan mengumpulkan berita, dikenal berbagai cara. Satu di antaranya ingin disebut di sini. Karena dipandang merupakan cara yang akan menunjang usaha

memasukkan desa ke dalam pers secara baik. Metode itu ialah metode partisipasi.

Yang perlu dicari oleh pers ialah bagaimana pelaksanaan konkrit pembangunan desa itu, apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana, jika tidak sesuai, mana yang kurang tepat, pelaksanaannya atau rencananya, bagaimana menemukan tanggapan masyarakat di desa, bagaimana menemukan kekuatan sosial dan dinamika sosialnya, bagaimana menemukan atau mengikuti transformasi dari potensi menjadi aktualisasi.

Kini disepakati bahwa yang pokok ialah mengungkap "kekuatan dalam" dari masyarakat itu sendiri. Menemukan kemungkinan-kemungkinan di sana. Unsur dari luar sekedar perangsang, pembantu.

Metode wawancara, melihat sebentar, tidak memadai untuk tugas penulisan di atas. Untuk bisa memberikan laporan yang memadai, pers perlu hidup di antara masyarakat desa, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu yang cukup. Berapa lamanya tergantung dari topik yang digarapnya. Maka diperlukan metode partisipasi di samping metode-metode lain yang secara tradisional dikenal oleh pekerjaan pers.

Misalnya mau menulis tentang kredit candak kulak: tidak cukup hanya berwawancara dengan pedagang desa yang memperoleh kredit itu. Di samping wawancara terhadap semua pihak yang terlibat, perlu juga mengikuti kehidupan pedagang itu sampai beberapa waktu lamanya, sampai diperoleh gambaran dan permasalahan selengkapya.

Kecuali menghasilkan materi yang memadai, metode partisipasi juga akan memberikan bahan penulisan yang kaya, hidup, penuh aneka dimensi. Dan itu semua adalah unsur-unsur dari jurnalisme yang baik.

ANALISA

Apakah yang diharapkan untuk diperoleh dari pemberitaan desa? Gambaran permasalahan yang lengkap, dinamis, penuh perbandingan, menunjukkan kecenderungan. Ditemukan kasus-kasus di mana secara nyata potensi masyarakat desa terkuak menjadi aktualitas. Mengungkapkan personalia yang menonjol keberhasilannya yang luar biasa uletnya. Mengungkapkan kasus-kasus tragis sebagai bahan pengalaman dan memperluas solidaritas. Pers juga dalam pembangunan desa, harus juga berfungsi dalam kontrol sosial.

3. BEBERAPA TIPOLOGI PERS

Yang dimaksudkan adalah tipologi ditinjau dari pers untuk pembangunan desa. Tipologi menyangkut isi dan penyelenggara pers.

Dihubungkan dengan pembangunan desa, sekarang ini bisa dibedakan 3 surat kabar:

1. Surat kabar yang terbit di Ibu Kota Negara;
2. Surat kabar yang terbit di Ibukota Propinsi dan
3. Surat kabar yang sengaja diterbitkan untuk para pembaca di pedesaan.

Ketiga surat kabar itu dalam pola yang tidak selalu berbeda, telah memuat berita-berita pedesaan.

Seperti media massa yang lain, surat kabar bisa berfungsi dalam proses integrasi nasional. Melalui pemberitaan dan ulasan yang bersifat nasional, orang di satu daerah mengetahui apa yang terjadi di daerah lain. Melalui pengetahuan itu ditimbulkan keterlibatan dan dengan itu juga diaktualkan proses integrasi nasional.

Karena itu adalah pada tempatnya, jika surat kabar yang terbit di ibukota negara juga memuat berita dan ulasan yang

bersangkutpaut dengan pembangunan desa. Kecuali untuk integrasi nasional, juga agar para pejabat di ibukota memperoleh data dan laporan di samping laporan resmi. Bisa dikembangkan proses interaksi dalam kontrol.

Tipologi surat kabar yang terbit di ibukota propinsi bisa bermacam-macam. Bisa sama polanya dengan suratkabar yang terbit di ibukota negara, hanya lokasi penerbitannya yang berbeda. Suratkabar ini isi maupun penyebarannya beruanglingkup nasional. Kecenderungan ke arah itu kuat pada tahun-tahun terakhir ini dan itu adalah gejala yang sehat.

Bisa juga di samping tipe itu, ditumbuhkan tipe koran di ibukota propinsi yang polanya lebih mendekati suratkabar komunitas atau sebutlah sekedar untuk membedakannya, suratkabar "daerah". Isi suratkabar komunitas ini terutama adalah peristiwa, permasalahan dan lain-lain yang berada di wilayah komunitasnya, di daerah. Peristiwa nasional diolah juga, tapi bukan yang pokok. Yang pokok kejadian dan permasalahan daerah.

Maka sirkulasi pun diusahakan berkonsentrasi pada daerahnya secara intensif. Menurut pengamatan, suratkabar jenis ini masih harus ditumbuhkan. Di sana sini mungkin sedang tumbuh, tetapi belum selalu jelas polanya. Banyak faktor mempengaruhi pertumbuhannya.

Kemauan dan kebijakan penerbit suratkabar, isi suratkabar, minat dan daya beli masyarakat di lingkungan komunitasnya, infrastruktur komunikasi, komunikasi berita dan komunikasi pengiriman suratkabar kepada para langganan.

Pembangunan desa bisa merupakan porsi yang lebih besar bagi suratkabar tipe tersebut. Karena lokasinya, suratkabar itu juga mempunyai kemungkinan lebih besar untuk masuk ke desa-desa. Pikiran Rakyat, edisi Ciamis, seringkali dipandang sebagai model yang kini ada.

ANALISA

Suratkabar komunitas, tetap suratkabar. Biarpun porsi terbesar isinya menyangkut peristiwa lokal dan persoalan pedesaan, semua itu harus tetap disajikan dalam bentuk berita, ulasan, gambar, profil, feature yang "jurnalistik". Jangan sampai memberi kesan sekedar pengumuman-pengumuman resmi dan petunjuk-petunjuk resmi.

Dalam kertas kerja ini tidak dipersoalkan, mingguan atau suratkabar pedesaan yang kini diasuh oleh Departemen Penerangan. Masyarakat pers dalam hal ini berpendapat, sejauh masyarakat pers sendiri belum mampu atau belum berminat untuk menerbitkan koran semacam itu, bisa difahami, jika pemerintah yang mengantamirnya.

Tetapi manakala masyarakat pers sendiri, terutama yang di ibukota propinsi mulai berminat dan mulai mampu untuk menangani sendiri lebih baik, penerbitan semacam itu diserahkan kepada masyarakat pers. Jika ada bantuan, maka itulah memang diperlukan untuk sekaligus mengembangkan suratkabar daerah.

Secara singkat pokok-pokok pikiran dalam kertas kerja ini menyangkut bahan diskusi:

1. Pers Indonesia mempunyai komitmen untuk terlibat dalam pembangunan desa dan masyarakat. Sebab desa dan kota adalah kesatuan dari masyarakat bangsa. Sebab sebagian terbesar penduduk, sekitar 80 persen, tinggal di pedesaan.
2. Bagaimana meluaskan persepsi berita dari berita perkotaan menjadi lebih luas sehingga juga menyangkut berita pedesaan.
3. Bagaimana menemukan bentuk "Jurnalistik" yang tetap menarik, mudah difahami dan lain-lain tentang berita dan permasalahan pedesaan.

4. Harus ada pengetahuan pers sendiri tentang pembangunan desa. Pengetahuan ini harus cukup komprehensif dan mendalam.
5. Siapa sebaiknya penyelenggara koran masuk desa. Ada beberapa kemungkinan yang perlu dikembangkan.

Masih tersedia Buku-buku terbitan CSIS:

1. Dua Pemikiran tentang Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional, Daoud JOESOEF	a Rp. 1.500,—
2. Economic Development and National Resilience, R.B. SOEHARTONO	a Rp. 500,—
3. Persoalan Masa Kini: Perusahaan-perusahaan Multinasional, J. PANGLAYKIM	a Rp.
4. Strategi Politik Nasional, Ali MOERTOPO	a Rp. 1.250,—
5. Business Relations between Indonesia and Japan, J. PANGLAYKIM	a Rp. 500,—
6. Indonesia dan Dunia Internasional 1974	a Rp. 1.750,—
7. Trends in Marketing, J. PANGLAYKIM	a Rp. 1.000,—
8. Buruh dan Tani dalam Pembangunan, Ali MOERTOPO	a Rp. 400,—
9. Seminar Strategi Pembinaan Pengusaha Swasta Nasional	a Rp. 2.000,—
10. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi luks)	a Rp. 1.200,—
11. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi biasa)	a Rp. 350,—
12. Self Reliance and National Resilience	a Rp. 1.250,—
13. Second Indonesian — Japanese Conference	a Rp. 1.500,—
14. Indonesia dan Dunia Internasional 1975	a Rp. 4.000,—
15. Indonesia dan Dunia Internasional 1976	a Rp. 5.000,—
16. Japan — Indonesia Relations in the Context of Regionalism in Asia	a Rp. 1.500,—
17. Indonesia's Economic and Business Relations with ASEAN and Japan, J. PANGLAYKIM	a Rp. 3.000,—
18. Timur Tengah dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO	a Rp. 1.500,—
19. Afrika dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO	a Rp. 1.500,—
20. Southeast Asia and the World of Tomorrow	a Rp. 3.000,—
21. Strategi Kebudayaan, Ali MOERTOPO	a Rp. 750,—
22. Indonesia dan Dunia Internasional 1977	a Rp. 5.000,—
23. P-4 and GBHN (bahasa Inggris)	a Rp. 600,—
24. Japan — Indonesia Cooperation: Problems and Prospects	a Rp. 1.500,—
25. ASEAN dalam Berita, Harapan dan Kenyataan 1967-1977	a Rp. 4.500,—
26. Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir Bagian I (Permasalahan), Onny S. PRIJONO dan A.M.W. PRANARKA	a Rp. 1.750,—
27. Indonesia dan Dunia Internasional 1978	a Rp. 5.000,—
28. Pancasila Arti dan Pelaksanaannya, Kirdi DIPOYUDO	a Rp. 900,—
29. Dasar-dasar Pendidikan, Mohammad SJAFEI	a Rp. 1.500,—
30. Emerging Enterprises in the Asia Pacific Region, J. PANGLAYKIM	a Rp. 1.500,—
31. Security Dimensions of the Asia Pacific Region in the 1980's, Jusuf WANANDI	a Rp. 1.500,—
32. Japan — Indonesia Relations: Past, Present, Future	a Rp. 2.000,—
33. Indonesia and Korea: The Next Decade	a Rp. 1.750,—

Pesanan luar kota ditambah ongkos kirim 15%; pembayaran di muka, dialamatkan ke: CSIS, Biro Publikasi, Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, telepon 349489.